

ABSTRAK

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Narkotika

Oleh : Alfiyatus Shalehah

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadisuatu masalah yang paling sensitif di dalam dunia kepegawaian khususnya di Indonesiasehingga perlu adanya suatuperhatian yang serius dari semua pihak. Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sebagian para pegawai pemerintahnyamasih ada yang melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan terancamnya jabatan mereka dari pegawai pemerintah. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan sebagai suatu pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan status dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri, baik itu diberhentikan secara hormat maupun diberhentikan secara tidak hormat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan dinas terkait dalam menyelesaikan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan bagaimana pertimbangan pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian bahan hukum yang sudah ada dikumpulkan dan diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada disesuaikan dengan isu hukum yang terjadi melalui hasil bahan pustaka dan putusan hakim, yang dianalisis dengan tehnik preskriptif kualitatif artinya bahan hukum yang diperoleh dihasilkan dari menelaah suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menelaah permasalahan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertimbangan dinas terkait dalam menyelesaikan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu dengan cara melakukan suatu pendidikan dan pelatihan jabatan atau yang sering disebut dengan diklat terhadap Pegawai Negeri Sipil. Dalam pertimbangan pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan narkotika yaitu dipidana penjara dan dikenakan sanksi berat dengan diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan suatu kejahatan yaitu penyalahgunaan narkotika.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk membimbing para Pegawai Negeri Sipil agar memiliki sikap dan tingkah laku yang baik dengan cara melakukan suatu pendidikan dan pelatihan jabatan atau yang sering disebut dengan diklatb terhadap Pegawai Negeri Sipil. Diklat ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan para pegawai pemerintah dan memperbaiki kepribadian serta etika para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran bagi dinas terkait yaitu alangkah lebih baiknya jika

melakukan sosialisasi mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba sehingga para Aparatur Sipil Negara bias lebih menjaga dirinya dan juga menjaga nama baik dinas yang bersangkutan.

Kata kunci :Pemberhentian, Aparatur Sipil Negara, Narkoba.



ABSTRACT

Dismissal Is Not With Respectful Of The State Civil Servants Who Commit Narcotics

By :Alfiyatus Shalehah

Dismissal of Civil Servants is one of the most sensitive issues in the world of staffing, especially in Indonesia, so there is a need for serious attention from all parties. The State of Indonesia is a country in which some government employees are still there who committed a crime that resulted in the threat of their position from government employees. Dismissal as a Civil Servant can be said as a dismissal which results in a person losing his status and position as a Civil Servant, be it honorably terminated or dishonorably dismissed.

Based on the above background, the authors want to know how the relevant agency considerations in resolving code of conduct crimes committed by the State Civil Apparatus and how to consider the imposition of sanctions imposed on State Civil Apparatuses who commit crimes on the code of ethics.

The research method used in this study is a normative juridical with a statutory approach (statue approach) obtained from primary and secondary legal sources, which then existing legal materials are collected and processed based on existing laws and regulations adjusted to legal issues that occur through the results of library materials and judges' decisions, which are analyzed with qualitative prescriptive techniques means that the legal material obtained is produced from examining an issue based on statutory regulations by examining issues from general to specific.

The results obtained are the consideration of the relevant agencies in resolving crime codes of ethics committed by the State Civil Apparatus by means of conducting an education and training position or often referred to as training against Civil Servants. In consideration of the imposition of sanctions imposed on State Civil Apparatuses who commit crimes on the code of ethics namely imprisoned and imposed severe sanctions by being dismissed with no respect for having committed a crime that is the misuse of narcotics.

The conclusion of this research is to guide the Civil Servants so that they have a good attitude and behavior by conducting an education and training position or often referred to as training for Civil Servants. This training aims to develop the knowledge, expertise, skills of government employees and improve the personality and ethics of employees in carrying out their duties and functions. Suggestions for related agencies is that it would be better if socializing about the effects of narcotics abuse so that the State Civil Apparatus can better protect themselves and also maintain the good name of the relevant agencies.

Keywords: Dismissal, State Civil Servants, Narcotics.